**Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapori (IPWL) Dalam Rehabilitasi
Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)**

Ilham Setiawan¹; Heryani², Nurul Hidayah Tumadi³

Email: heryani.s.thi.15@gmail.com

¹Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

²Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

³Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

ABSTRACT

Drug addict rehabilitating his way gets ipwl card, beginning at 13 years of age or high. the no.1 treatment period for nakotika addicts is still applied to ipwl cards but, many of those who have associated cards are misused to make money from narcotics so ipwl card owners are often used for other purposes based on the background of the problem raised above, so the problem with this research is that 1) the use of ipwl cards in the application of drugs for addicts to rehab addiction 2) is that the problem of bag usage ipwl card 3) what does being learned from the 2011 government rule. To obtain data or nformas capability in im research, researchers control the form of vuridis normatif legal research which decluded the ipwl card processing factor 1) your keharga factor 2) a kearga solution that can be taken from pp no 25 in 2011, which is a survival boost for rehabilitated drug addicts who have ipwl.

Keyword: abuse, duty card report (IPWL), pp no 25 in 2011

ABSTRAK

Pecandu narkoba yang di rehabilitas jalan mendapatkan kartu IPWL, mulai usia dari 13 tahun keatas, selama masa pengobatan bagi pecandu nakotika masih diberlakukan kartu IPWL. Tetapi, banyak sekali oknum-oknum bagi yang memiliki kartu tersebut disalahgunakan. Demi mendapatkan uang dari pecandu narkotika maka pemilikkartu IPWL sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Penggunaan Kartu IPWL dalam Pengambilan Obat bagi Pecandu Rehabilitasi Narkotika 2) Apa Faktor Penyalahgunaan bagi Pemegang Kartu IPWL 3) Apa Hikmah yang dapat diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penyalahgunaan kartu IPWL bagi Pemiliknya dalam pengambilan obat di Puskesmas. Untuk memperoleh data atau informasi dalam

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Laport (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

penelitian ini, maka peneliti memilih jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif. Faktor Penyalahgunaan bagi Pemegang Kartu IPWL, yaitu: 1) Faktor ekonomi 2) Faktor keluarga. Hikmah yang dapat diambil dari PP No. 25 Tahun 2011, yaitu: 1) Penyemangat sembuh bagi pecandu narkotika yang sedang masa rehabilitasi dengan memiliki kartu IPWL, 2) Menentramkan pikiran dan jiwa bagi pecandu yang sedang dalam masa rehabilitasi.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Kartu Wajib Laport (IPWL), PP Nomor 25 Tahun 2011*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, begitu kata-kata dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) kita. Dalam praktik, fikiran kita pada umumnya lalu melompat kepada *Rule Of Law*. Artinya, rumusan dalam Undang-Undang itu lalu kita praktikan dengan doktrin dan asas yang ada pada *Rule Of Law* tersebut.¹

Umum yang masyarakat ketahui adalah istilah "*nyimeng*", "*ngobat*", "*sakau*" dan lain sebagainya. Jadi, sebelum lebih jauh. Pengertian Narkotika terlebih dahulu. Karena selama ini ada pergeseran makna arti kampanye anti narkoba adalah narkotika dan obat yang berbahaya. Namun, berjalannya arus informasi kepanjangan narkoba dari obat "berbahaya" dirasa kurang tepat, karena dalam ilmu kedokteran obat berbahaya adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis.²

Dalam Islam juga telah dijelaskan pada (Q.S. Al-Baqarah/02 : 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya

¹SatjiptoRahardjo. *Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: BukuKompas), hlm. 7.

²AuliaFadhli. *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi Penanggulannya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 1.

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

kepadamuapa yang merencanakan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

(Q. S. Al-Baqarah/02 : 219)³

Bahan-bahan atau obat yang merupakan jenis bahan-bahan yang digunakan dalam dunia kedokteran, yang berfungsi untuk pengobatan dan dosisnya pun ditentukan oleh tenaga yang sudah berpengalaman. Dalam arti kata, obat-obatan ini tetap boleh digunakan selama itu untuk proses pengobatan dan dalam takaran tertentu sesuai dengan dosis yang dianjurkan atau disarankan dokter.⁴ NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat atau otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik/jiwa dalam fungsi sosial.⁵

Pada awal observasi di Puskesmas I Kec. Tungkal Ilir, Peneliti bertemu dengan salah seorang pemilik kartu IPWL yang melakukan pengambilan obat untuk kesembuhannya. Adapun Kartu IPWL ini didapat dari Rumah Sakit Jiwa Jambi yang pemiliknya sudah direhabilitas total/ rehabilitas jalan. Kartu IPWL ini juga merupakan Program Pemerintah untuk membantu pecandu narkoba dalam mengatasi masalah narkoba yang sedang mereka alami yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial pecandu narkoba agar kembali sehat dan produktif.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti yang berjudul: "**PENYALAHGUNAAN PEMEGANG KARTU WAJIB LAPOR DALAM REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR (TELAH PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 25 TAHUN 2011).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Penggunaan Kartu

³Departemen Agama RI. *aL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 34.

⁴Aulia Fadhli. *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi Penanggulannya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 55.

⁵*Ibid*, hlm. 56-57.

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

IPWL dalam Pengambilan Obat bagi Pecandu Rehabilitasi Narkotika?; Apa Faktor Penyalahgunaan bagi Pemegang Kartu IPWL?; Apa Hikmah yang dapat diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011?

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Penggunaan Kartu IPWL dalam Pengambilan Obat bagi Pecandu Rehabilitasi Narkotika, Faktor Penyalahgunaan bagi Pemegang Kartu IPWL, Hikmah yang dapat diambil dari PP No. 25 Tahun 2011.

Landasan Teori

Sistem Penggunaan Kartu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Wajib Lapor sendiri diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011, pelaksanaan program wajib lapor dilakukan di sebuah lembaga yang disebut Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁶

Firman Allah SWT, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan belanjakanlah (hartabendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".*

(Q. S. Al-Baqarah/02 : 195)⁷

Rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang juga merupakan implementasi dari pasal 54 Undang-undang Narkotika dimana para pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

⁷Departemen Agama RI. *aL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 30.

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

dapat melakukan wajib lapor yang kemudian akan direhabilitasi di lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁸

Namun, bagaimanapun juga konsep dari kata “rehabilitasi” ini memiliki banyak arti yang berbeda bias bertambah atau memudar dari tahun ke tahun serta populer dikenal sebagai prinsip hukuman atau keadilan untuk penghukuman. Rehabilitasi sering dikaitkan dengan penghukuman, namun jika dalam konteks yang berbeda. Menurut Mc Neill, hukuman yang konstruktif bisa bersifat rehabilitatif; seharusnya rehabilitatif dan pasti rehabilitatif. Namun, hanya bekerja untuk mencegah kejahatan jika hukuman tersebut mampu memberikan keadilan dan membutuhkan perhatian dari empat untaian yaitu psikologi, yudisial, sosial dan moral rehabilitasi. Rehabilitasi berfungsi sebagai filsafat penghukuman apabila digunakan pada pelaku kejahatan (*offender*), Namun rehabilitasi bukanlah bentuk murni dari hukuman, berbeda dengan konsep *deterrence* atau retribusi dengan tujuan pembalasan, rehabilitasi lebih kearah penyembuhan/pemulihan.⁹

Penelitian ini juga pernah diteliti sebelumnya oleh Moh. Idil Ghufroon “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kartu IPWL Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pramulih”. Hasil penelitiannya: dalam meningkatkan masyarakat agar hidup sehat dan tidak semakin sesat akan barang terlarang maka pemerintah meningkatkan pelayanan pemberian kartu IPWL dengan sesuai UU yang berlaku. Irfan Ardhian “Program Wajib Lapor Di Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Menangani Pecandu Dan Korban Pelanggaran Narkotika (Studi Di Institusi Penerima Wajib Lapor D.I.Y)” Hasil penelitian: bahwa program wajib lapor sendiri dilaksanakan di sebuah lembaga/ institusi baik kesehatan maupun sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang secara khusus dipersiapkan untuk pelaksanaan program wajib lapor. Lokasi IPWL yang menyebar serta berada ditengah masyarakat mempermudah akses pelayanan program wajib lapor bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan program wajib lapor menjadi lebih efektif. Dan Fertha Novan Yufara

⁸Rehabilitation Theory, <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/rehabilitation-theory.pdf>. Dikutip pada 11 Agustus 2020

⁹Rehabilitation Theory, <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/rehabilitation-theory.pdf>. Dikutip pada 11 Agustus 2020

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkai Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

“Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Palembang” Hasil penelitian: dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pemerintah telah membuat peraturan pemerintah mengenai program wajib lapor bagi pecandu narkoba. Pengaturan dilakukan didalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi para pecandu narkotika. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini, maka peneliti memilih jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif yang mana dalam permasalahan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang penyalahgunaan pemilik kartu IPWL di Kuala Tungkal. Penelitian hukum secara yuridis ini maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Dalam Penelitian Hukum Normatif terdapat beberapa pendekatan salah satunya Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan peneliti memakai pendekatan ini karena pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data. Data primer berasal dari PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan pemerintah daerah sebagai pengguna pemilik kartu IPWL. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas dan peraturan-peraturan.¹¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis tabel, (catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹² Data Tersier adalah suatu kumpulan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Grup, 2013), hal. 158.

¹¹*Ibid.* 195-196

¹²Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* Cet 16, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hlm. 22.

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapori (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang terkait dengan masalah ini.¹³

Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data atau pengukurannya. Kalau alat pengumpulan alat pengambilan datanya cukup *reliabel* dan *valid*, maka datanya juga akan cukup *reliabel* dan *valid*. Namun masih ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan, yaitu kualifikasi pengambilan data. Beberapa alat pengambilan data masyarakat kualifikasi tertentu pada pihak pengambilan data.¹⁴ Peneliti menggunakan beberapa metode antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.¹⁵

Wawancara adalah hal ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis serta menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi.¹⁶

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.

¹³Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

¹⁴SumadiSuryabarata. *MetodologiPenelitian*Cet 26, (Depok: RajagrafindoPersada, 2015), hlm. 38-39.

¹⁵Burhan Ashofa, *MetodePenelitian Hukum*, (Jakarta: PT RenikaCipta, 2014),Hlm. 26.

¹⁶*Ibid*, hlm. 95.

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hal analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang dari bahan hukum berdasarkan konsep dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.¹⁷

B. PEMBAHASAN

Penggunaan Kartu IPWL dalam Pengambilan Obat bagi Pecandu Rehabilitasi Narkotika

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Erni Yusnita selaku kepala Puskesmas 1 Kecamatan Tungkal Ilir.¹⁸

“Pihak kami Puskesmas 1 selaku selalu memberikan pelayanan terhadap pemilik kartu ipwl dalam pengambilan obat dan bagi yang dalam pengawasan dari pihak kami untuk rehabilitasi pecandu narkotika”

Kemudian Senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Evi, pegawai honorer Puskesmas 1 Kecamatan Tungkal Ilir saat ditemui.¹⁹

“Bagi kami Siapa saja yang memegang kartu Wajib Lapor atau ipwl untuk mengambil obat, maka kami akan berikan dan sesuai dengan mengikuti anjuran dari resep dokter”

Institusi Penerima Wajib Lapor merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. Institusi Penerima Wajib Lapor yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Institusi Penerima Wajib Lapor bertujuan merangkul pengguna atau

¹⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69-70.

¹⁸ wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, Kepala Puskesmas I Kecamatan Tungkal Ilir pada 10 April 2021

¹⁹wawancara dengan Evi, Pegawai Honor Puskesmas I Kecamatan Tungkal Ilir 10 April 2021

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

pecandu narkotika, sebagai proses rehabilitasi.

Bagi penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur dan juga bisa dilaporkan oleh keluarga pecandu yang sudah cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penyalahguna narkotika yang belum cukup umur dalam melaksanakan wajib lapor dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua / wali penyalahguna narkotika. Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi.²⁰ melalui Institusi Penerima Wajib Lapor, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Bagi pecandu narkotika walaupun sedang dalam pengawasan rehabilitasi tetapi ketangkapan masih juga memakai atau menggunakan narkotika maka tetap akan diproses secara hukum yang dalam hal ini karena bagi pecandu yang direhabilitasi tersebut tidak di makan atau dengan kata lain tinggal di rumah sendiri tetapi pada saat keperluan pengambilan obat maka yang bersangkutan baru ke Puskesmas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Erni Yusnita,²¹

“Setiap pecandu dalam rehabilitasi baik rehabilitasi Mandiri atau dalam pengawasan tetapi jika tertangkap sedang memakai obat narkotika maka harus diproses secara hukum”

Kemudian Ibu Erni juga menyampaikan,²²

“Sebaiknya bagi pemegang atau pemilik kartu ipwl hendaknya tidak menyalahgunakan kartu tersebut apalagi sampai menyalahgunakannya kartu IPWL tersebut merupakan kartu untuk pengambilan obat di puskesmas”

Dari hasil wawancara dengan ibu Erni dan salah seorang pegawai honor yang bertugas pada saat peneliti melakukan wawancara, bahwa bagi pemilik atau pemegang kartu ipwl ketika ingin melakukan pengambilan obat maka pihak Puskesmas akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan bagi pecandu baik dalam rehabilitasi mandiri ataupun direhabilitasi dalam pengawasan

²⁰**Rehabilitasi** adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi_medis

²¹wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, Kepala Puskesmas I Kecamatan Tungkal Ilir, 10 Mei 2021

²²wawancara dengan Ibu Erni, 10 Mei 2021

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

Puskesmas. Apabila terdapat atau ketangkapan masih menggunakan narkotika maka tetap akan diproses secara hukum, tidak ada perlindungan istimewa tetapi jika pecandu narkotika yang dalam rehabilitasi tetap mengikuti anjuran dokter maka akan sangat besar kemungkinan dapat sembuh total dari kecanduan tersebut.

Salah seorang yang melakukan penyalahgunaan terhadap penggunaan kartu IPWL yang nama nya di inisialkan AL mengatakan.

“Terkadang kami mengambil obat untuk diri kami sendiri dan juga bisa kami jual kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan karena obat atau pil alprazolam yang kami dapat dari pemegang kartu IPWL ini sifat nya menenangkan kalau di konsumsi melebihi dosis akan membuat rileks dan dan nyaman”.²³

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa orang yang mempunyai kartu IPWL ini menyalahgunakan dan menjual obat nya ke orang lain demi mendapatkan keuntungan diri sendiri.

Di tempat yang terpisah salah seorang pengguna kartu IPWL juga mengatakan

“pengambilan obat ini tidak bisa sembarangan ada prosedur tertentu yang di lewati salah satu nya terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba maka di berikan rehabilitasi dalam upaya penyembuhan. Terkadang juga ada inisiatif untuk menjual obat tersebut kepada orang yang juga membutuhkan, mau tidak mau kami jual lah karna mereka itu tidak punya kartu IPWL”.²⁴

Faktor Penyalahgunaan bagi Pemegang Kartu IPWL

Faktor ekonomi

Permasalahan utama berkaitan dengan faktor ekonomi biasanya meliputi: Penghasilan yang tidak sepadan dengan kebutuhan yang dikeluarkan, Tidak mempunyai rencana keuangan, segala tindakan mengenai keuangan tanpa diatur pengeluarannya maka akan menyebabkan gagalnya dalam mewujudkan impian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Deddy, seorang yang pernah direhabilitasi

²³Wawancara dengan AL. pemegang kartu IPWL. Tanggal 20 Mei 2021

²⁴Wawancara dengan Yahya pemegang kartu IPWL. tanggal 20 Mei 2021

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

dalam pengawasan lembaga kesehatan atau puskesmas:²⁵

"Saya benar-benar melawan segala ego dalam diri saya, saat saya bekerja selayaknya pekerjaan sama seperti orang banyak, maka ada rasa malu, depresi, ataupun kemalasan dalam diri saya, tapi itu semua saya lawan demi kesembuhan saya"

Senada juga disampaikan oleh Herry²⁶

"Saya pada saat masa rehabilitasi, saya masih punya tabungan uang sendiri tetapi tidak bekal selama saya dalam masa penyembuhan"

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat betapa pentingnya ekonomi bagi seseorang dalam masa rehabilitasi atau pengawasan Puskesmas. Oleh sebab itu, kartu IPWL sangatlah membantu bagi orang yang dalam masa rehabilitasi untuk pengambilan obatnya di Puskesmas. Karena kartu IPWL ini bagi pecandu dalam masa rehabilitasi, pengambilan obat di Puskesmas secara gratis atau cuma-cuma diberikan dari pihak Puskesmas tanpa membayar sama sekali.

Namun disinilah masalah muncul kembali dengan pengambilan obat gratis bagi pemilik kartu ipwl, maka ada pemilik kartu ipwl tersebut menyalahgunakannya dengan cara menjual kepada rekan lainnya yang belum dapat kartu ipwl. Bagi pemilik kartu ipwl yang sedang dalam kesulitan ekonomi atau keuangan, maka obat yang diambilnya secara gratis dari Puskesmas tersebut dijualnya kembali kepada rekan lainnya. Dengan dijualnya obat tersebut maka, seseorang tersebut akan mendapat uang dari hasil penjualannya dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Deddy.:²⁷

"Iya saya pernah menjual obat yang saya ambil di Puskesmas secara gratis karena saya punya kartu ipwl. Adapun teman saya yang juga dalam masa rehabilitasi mandiri belum punya kartu ipwl, maka saya jual ke dia dengan harga lebih murah dari Apotek yang ada di Kuala Tungkal ini, sehingga uang dari hasil penjualan obat tersebut saya gunakan untuk membeli kebutuhan

²⁵Wawancara dengan Deddy, 20 Mei 2021

²⁶Wawancara dengan Herry, 20 Mei 2021

²⁷Wawancara dengan Deddy, 21 Mei 2021

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

hidup saya”

Faktor keluarga

Bagi pemegang kartu ini juga sangat berpengaruh terhadap keluarga, keberadaan keluarga hakikatnya sangat besar akan penyembuhan bagi pecandu narkotika dalam masa rehabilitasi ataupun penyembuhan secara mandiri. Namun, ada juga keluarga yang dengan sengaja menyalahgunakan kartu ipwl ketika dalam pengambilan obat di Puskesmas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Herry tentang adanya pihak keluarga yang menyalahgunakan kartu IPWL:²⁸

"Obat bagi pecandu narkotika yang dalam masa rehabilitasi itu sebenarnya agak mahal dijual di Apotek Nah bagi pemilik kartu ipwl akan gratis ngambil obatnya di Puskesmas kemudian dijual kepada rekan yang secara mandiri melakukan rehabilitasi dengan harga yang murah"

Faktor lingkungan

Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, dan mengalami tekanan jiwa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya

“dulu pertama kali kenal dengan namanya narkoba dan sejenisnya awal nya memang dari teman. Karena rasa penasaran saya kuat ingin mencoba dan awal nya juga haya menyicip hingga sampai jadi kecanduan, Karen pengaruh teman-teman yang di lingkungan tidak baik bisa ngikut tidak baik juga.²⁹

Dari perkataan yahya tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan yang sifatnya negatif akan mengikut kearah yang tidak baik, karena pergaulan dan lingkungan yang salah.

²⁸Wawancara dengan Herry, tanggal 30 Mei 2021

²⁹Wawancara dengan Yahya pemegang kartu IPWL. Tanggal 30 Mei 2021

Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Lapor (IPWL) Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)

Hikmah yang dapat diambil dari PP No. 25 Tahun 2011

Penyemangat sembuh bagi pecandu narkotika yang sedang dalam masa rehabilitasi dengan memiliki kartu IPWL

Menentramkan pikiran dan jiwa bagi pecandu yang dalam masa rehabilitasi

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Tungkal 1 Ibu Erni Yusnita yaitu:³⁰

"Saya sangat bersyukur bahwa kartu ipwl yang disediakan oleh pemerintah benar-benar memberi pengaruh yang besar bagi pecandu yang dalam rehabilitasi, karena obat-obatan yang diperlukan bisa diambil secara gratis di Puskesmas ini sehingga mereka tidak perlu merasa was-was untuk memakan obatnya agar tentram pikiran dan jiwa mereka."

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Deddy:³¹

"Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena memang sangat peduli kepada penyembuhan korban pecandu narkotika dengan rehabilitasi pengawasan kesehatan"

C. PENUTUP

Kesimpulan

Hikmah yang dapat diambil dari PP nomor 25 tahun 2014 yaitu penyemangat sembuh bagi pecandu narkotika yang sedang masa rehabilitasi dengan memiliki kartu IPWL, menentramkan pikiran dan jiwa bagi pecandu yang sedang dalam masa rehabilitasi.

Saran

Bagi pecandu yang sedang dalam masa rehabilitasi hendaknya bersungguhsungguh untuk penyembuhannya dan bisa menjalani kehidupan ini secara normal lagi dan bagi pemerintah telah menjadi andalan bagi rakyatnya yang sedang dalam penyembuhan diri dari ketergantungan obat terlarang.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Erni Yusnita, 1 April 2021

³¹ Wawancara dengan Deddy, 1 April 2021

**Penyalahgunaan Pemegang Kartu Wajib Laport (IPWL) Dalam Rehabilitasi
Pecandu Narkotika Di Kecamatan Tungkal Ilir (Telaah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011)**

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *aL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013)
- Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Gramedia)
- Aulia Fadhi. *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi Penanggulannya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2014)
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Dharma Bhakti. *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkotika*, (Bekasi: sinergi Pustaka Indonesia, 2010)
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010)
- Koesno Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008)
- Moh. Taufik Makarao, Moh. Zakky dan Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Grup, 2013)
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Cet 16*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010)
- Sumadi Suryabarata. *Metodologi Penelitian, Cet 26*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Undang - undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau ini disahkan pada tanggal 9 Agustus 1957 dan berlaku mulai tanggal 10 Agustus 1957
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika